

## **ANALISIS KOMPARASI DAMPAK PEMBANGUNAN DESA DALAM PENGENTASAN MASALAH PENGANGGURAN**

### ***COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF VILLAGE DEVELOPMENT IN ALLEVIATING THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT***

**Iman Rifai<sup>1</sup> dan Oki Oktaviana<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Indonesia

\*Email: oktavianaoki@gmail.com

disubmit: 27 Oktober 2023, direvisi: 1 Desember 2023, diterima: 7 Desember 2023

#### **ABSTRAK**

Tingginya tingkat pengangguran merupakan indikator yang menjadi salah satu permasalahan pembangunan di wilayah provinsi Banten. Berbeda dengan kondisi nasional, pengangguran di wilayah perdesaan di provinsi Banten relatif selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengangguran di wilayah desa provinsi Banten sebagai salah satu ukuran efektivitas pembangunan desa yang selama ini dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif berdasarkan analisis komparasi data pengangguran di wilayah perdesaan dan perkotaan di provinsi Banten sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menunjukkan trend penurunan pengangguran di wilayah perdesaan provinsi Banten periode 2010-2014 lebih cepat dibandingkan dengan periode 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa pasca UU 6/2014 belum mampu menciptakan akselerasi pengentasan pengangguran di wilayah perdesaan. Belum optimalnya pembangunan desa dalam hal pengurangan pengangguran, disebabkan kurangnya keberpihakan penganggaran di Bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran pembangunan desa yang selama ini dilakukan lebih terkonsentrasi pada Bidang Pelaksanaan pembangunan desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

**Kata kunci:** *Pengangguran perdesaan, Provinsi Banten, Undang-Undang Desa, Anggaran pembangunan*

#### **ABSTRACT**

*The high unemployment rate is an indicator of one of the development problems in Banten province. Different with the national condition, unemployment in rural areas in Banten province is relatively always higher than in urban areas. Therefore, this study aims to analyze the unemployment problem in the rural areas of Banten province as a measure of the effectiveness of village development that has been carried out. This research is a descriptive quantitative study based on a comparative analysis of unemployment data in rural and urban areas in Banten province before and after the enactment of Law No. 6/2014 on Villages. The results showed that the downward trend of unemployment in rural areas in Banten province in the 2010-2014 period was faster than that in the 2015-2019 period. This shows that the implementation of village development after Law 6/2014 has not been able to create an acceleration of unemployment alleviation in rural areas. The lack of optimization of village development in terms of reducing unemployment is due to the lack of alignment of budgeting in the field of community development and community empowerment. Village development budgeting that has been carried out is more concentrated in the fields of village development implementation and village government administration*

**Keywords:** *Rural unemployment, Banten Province, Village Law, Development budget*

## PENDAHULUAN

Lebih dari sewindu sudah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diimplementasikan. Irawan (2017) menyebutkan bahwa UU nomor 6/2014 merupakan salah satu kebijakan afirmatif sebagai bentuk reorientasi perlakuan dari pemerintah kepada tata kelola pemerintahan terkecil yang disebut dengan desa. Implementasi UU nomor 6/2014 melahirkan perencanaan desa seutuhnya yakni *village self planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan secara mandiri oleh desa (Sutoro *et al.*, 2014).

Semangat membangun desa dengan pendekatan memandirikan desa berdasarkan pengakuan kedaulatan dan pembagian kewenangan di satu sisi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan. Masih adanya persoalan tersebut memang sesuatu hal yang wajar mengingat pembangunan tentu saja bersifat dinamis dan akan terus menuntut penyempurnaan sepanjang kehidupan masih berlangsung.

Sudut pandang keberhasilan pembangunan desa salah satunya bisa merujuk kepada perbaikan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa yang sebelumnya banyak dikeluhkan. Berdasarkan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyebutkan bahwa dana desa yang telah disalurkan

sepanjang 2015-2020 telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat maupun prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti jalan desa sepanjang 261.877 kilometer, jembatan sepanjang 1.494.804 meter, pasar desa 11.944 unit, badan usaha milik desa (BUMdes) 39.844, tambatan perahu 7.007 unit, embung 5.202 unit, irigasi 76.453 unit, dan sarana olahraga 27.753 unit (Purnamasari & Galih, 2015). Tidak hanya sampai disitu, argumentasi keberhasilan pembangunan juga coba diperkuat dengan perkembangan jumlah pasar desa, posyandu, sarana olah raga desa serta fasilitas lainnya yang dianggap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Yuwono, 2022). Realisasi Dana Desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa di Indonesia (Kurniawan, 2021).

Klaim keberhasilan sebagaimana disampaikan di atas tentu saja tidak membuat *stakeholder* pembangunan desa berpuas diri. Masih banyak persoalan yang menggambarkan pencapaian pembangunan yang selama digulirkan di wilayah perdesaan belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan. Selain persentase kemiskinan wilayah perdesaan yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2021) permasalahan

masih tingginya tingkat urbanisasi sebagaimana disampaikan Herlindawati *et al.* (2018) menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah perdesaan. FAO (2016) menyebutkan bahwa kurangnya kesempatan kerja, akses terbatas ke perlindungan sosial, penipisan sumber daya alam dan dampak buruk dari degradasi lingkungan, membuat banyak penduduk desa bermigrasi ke wilayah perkotaan untuk mencari mata pekerjaan. Selain itu, kasus korupsi yang banyak terjadi dalam penggunaan Dana Desa (Primayoga, 2018) menambah panjang daftar upaya perbaikan yang harus negara lakukan agar di masa mendatang penyalurannya lebih tepat sasaran dan secara efektif dapat berakselerasi dalam pencapaian tujuan pembangunan baik di level pemerintah desa itu sendiri, Kabupaten, Provinsi bahkan sampai pada tingkat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pencapaian tujuan pembangunan ini tentu saja mengacu kepada realisasi berbagai indikator strategis yang selama ini tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Terbuka (TPT), Gini Rasio dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Tingginya tingkat pengangguran merupakan indikator yang menjadi salah satu permasalahan pembangunan di wilayah

provinsi Banten. Setiap rilis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di provinsi ini selalu lebih tinggi di atas nilai nasional. Oktaviana, (2023) secara lebih spesifik menyebutkan adanya anomali kondisi pengangguran di wilayah provinsi Banten dibandingkan dengan pengangguran di tingkat nasional. Jika pengangguran di tingkat nasional lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, hal berbeda terjadi dengan kondisi pengangguran di wilayah provinsi Banten yang justru terkonsentrasi di wilayah perdesaan.

Berbagai studi tentang pembangunan desa dalam hal pengentasan masalah pengangguran lebih banyak dilakukan melalui pendekatan korelasi antara penggunaan dana desa dengan indikator pengangguran atau pun indikator pembangunan lainnya seperti pengentasan kemiskinan atau pun ketimpangan, tanpa melakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah implementasi UU 6/2014. Hasil penelitian Yacoub (2023) menyebutkan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran namun berpengaruh negatif dan signifikan kemiskinan di Kalimantan Barat. Penelitian lainnya menyebutkan Dana desa sudah memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia walaupun hasilnya belum terlalu signifikan karena dana desa belum

berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di beberapa daerah kabupaten/kota (Fitria *et al.*, 2021). Pelaksanaan penggunaan dana desa dalam pembangunan di wilayah perdesaan masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa serta belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif (Aziz, 2016). Alvaro & Christianingrum (2020) menyampaikan hal yang sama yakni dana desa belum sepenuhnya optimal dalam memutar roda perekonomian di desa. Hal ini diperkuat hasil penelitian Wijaya *et al.* (2020) tentang faktor penyebab pengangguran di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang menyebutkan bahwa pembangunan desa belum mampu mengatasi minimnya lapangan pekerjaan di Desa. Beberapa penelitian tersebut menggambarkan keberagaman hasil pembangunan desa setelah adanya implementasi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Berbagai hasil pembangunan desa selama ini meskipun sudah menunjukan hasil yang lebih baik namun menuntut berbagai upaya perbaikan agar hasilnya lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang perlu untuk mengangkat permasalahan pengangguran di wilayah perdesaan provinsi Banten dilihat dari aspek efektivitas pembangunan desa yang selama ini dilakukan berdasarkan

komparasi sebelum dan sesudah adanya Dana Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif berdasarkan analisis komparasi data pengangguran di wilayah perdesaan dan perkotaan di provinsi Banten sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain itu dilakukan analisis terhadap penganggaran bidang pembangunan desa antar wilayah kabupaten di provinsi Banten serta rata-rata alokasi penganggaran bidang pembangunan di tingkat nasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikeluarkan oleh institusi yang memiliki kewenangan melakukan publikasi berdasarkan regulasi Pemerintah seperti Badan Pusat Statistik untuk data pengangguran serta data Statistik Keuangan Desa. Data Pengangguran yang digunakan merupakan data bulan Februari dan Agustus dengan data time series mulai tahun 2010. Penggunaan tahun awal dan rentang waktu 2010-2014 dengan 2015-2019 dimaksudkan sebagai data pembandingan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

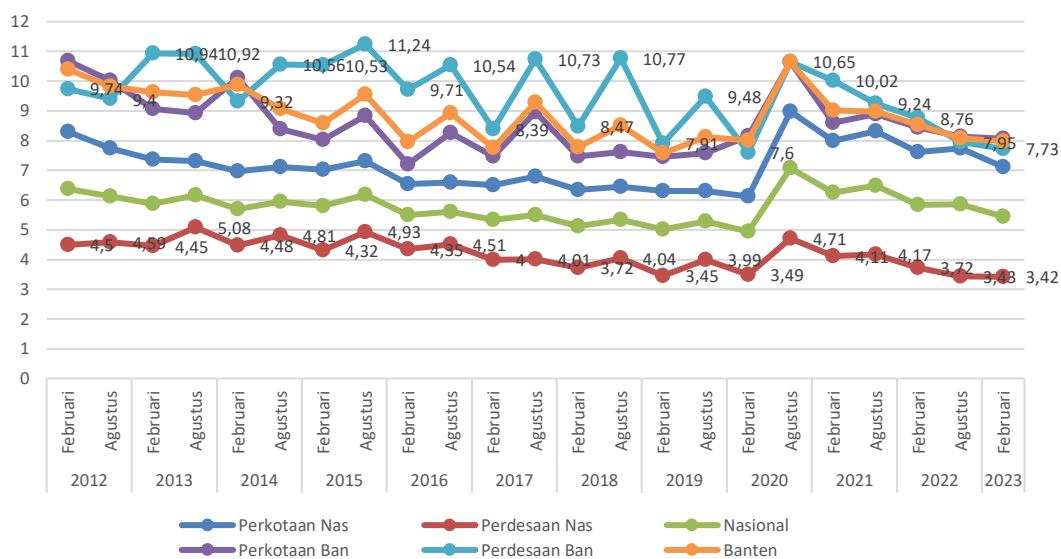
Pengangguran menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian

Pemerintah Provinsi Banten mengingat TPT di wilayah provinsi Banten selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional. Bahkan data BPS beberapa tahun terakhir senantiasa menempatkan provinsi Banten dalam peringkat tiga besar diantara provinsi lainnya di Indonesia dalam hal tingginya persentase TPT.

Selain tingginya tingkat persentase pengangguran, permasalahan lainnya yang dijumpai adalah anomali kondisi pengangguran yang justru relatif terkonsentrasi di wilayah perdesaan Oktaviana (2023). Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria wilayah, pengangguran di wilayah perdesaan relatif selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi pengangguran di tingkat

nasional yang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Secara lebih lengkap tingkat pengangguran berdasarkan klasifikasi daerah disajikan pada Gambar 1.

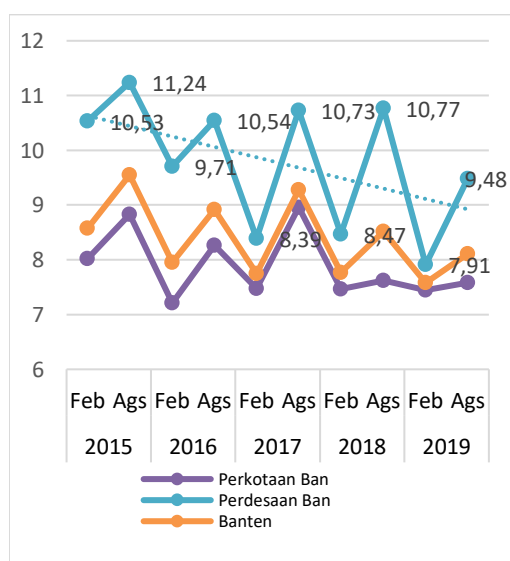
Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa pengangguran di wilayah perdesaan provinsi Banten menunjukkan kondisi selalu lebih tinggi juga lebih fluktuatif dibandingkan dengan tingkat pengangguran wilayah perdesaan secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayah perdesaan belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap dan menarik minat angkatan kerja yang tersedia di desa sebagaimana disampaikan Suasih & Karmini (2022) atau pun Wijaya *et al.* (2020) yang menyebutkan faktor penyebab pengangguran di wilayah perdesaan antara lain lapangan pekerjaan di desa dianggap



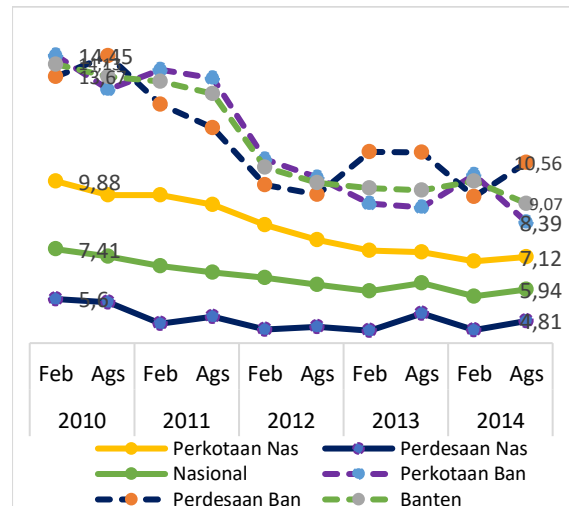
Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Sumber: BPS Banten 2023 (Diolah)

kurang menjanjikan karena kecilnya pendapatan yang diterima. Sektor pertanian sebagai sektor utama masyarakat Desa sebagai sumber penghasilan, kurang diminati oleh para pemuda desa karena dianggap kurang menjanjikan kesejahteraan dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Para pemuda desa lebih berminat untuk bekerja di berbagai industri yang terdapat di kota. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa perlu diarahkan kepada upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian sehingga dapat mengatasi minimnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor tersebut.

Permasalahan pengangguran di wilayah perdesaan di provinsi Banten juga nampak dari trend penurunan TPT yang mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2015-2019



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2010-2014

Periodesasi (2010-2014) sebelum implementasi Undang-Undang Desa, trend penurunan pengangguran yang tampak pada Gambar 3 menunjukkan kondisi yang lebih curam dibandingkan dengan trend penurunan pengangguran periode setelah implementasi Undang-Undang Desa (2015-2019).

Gambar 2 menunjukkan bahwa selama periode Februari 2010 sampai dengan Februari 2014 terjadi penurunan pengangguran wilayah perdesaan sebesar 3,11%. Pada februari 2010 TPT di wilayah perdesaan sebesar 13,67% menurun menjadi 10,56% di tahun 2014 bulan yang sama. Trend penurunan tersebut mengalami perlambatan jika kita melihat data pengangguran di wilayah perdesaan periode 2015-2019. Selama periode tersebut penurunan tingkat pengangguran di wilayah

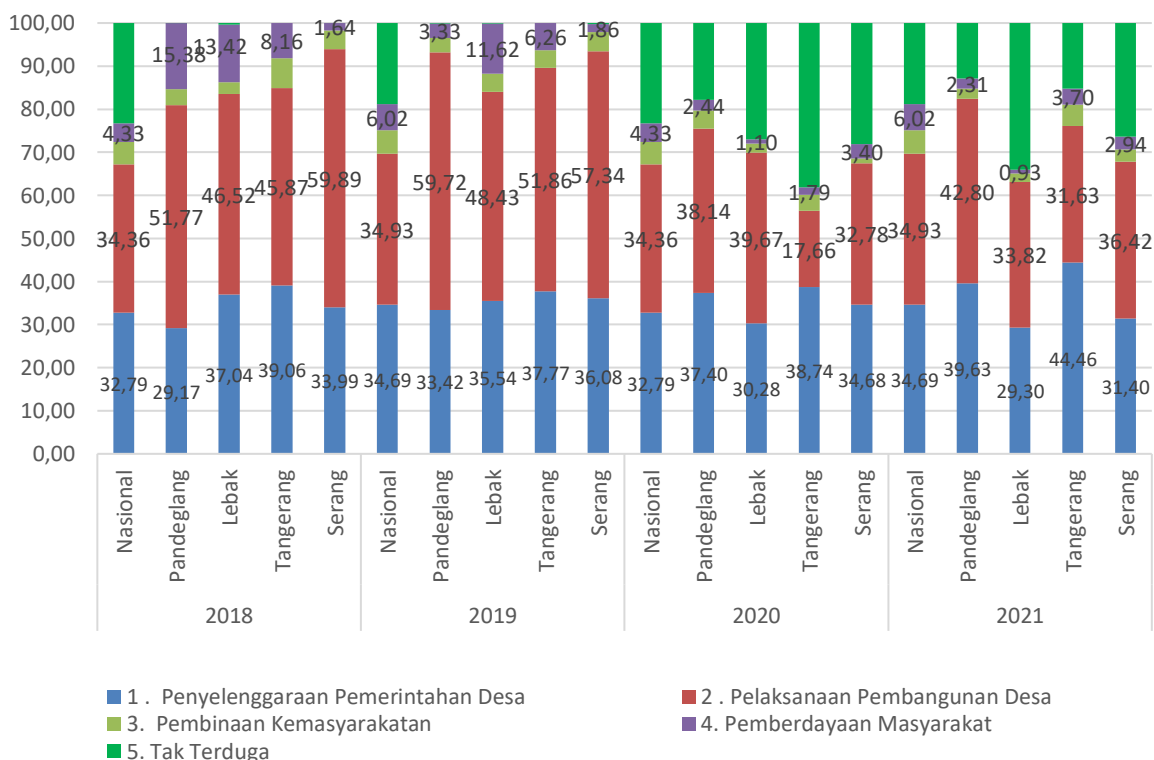
perdesaan hanya mencapai 1,05% atau menurun menjadi 9,48% pada bulan agustus tahun 2019 dibandingkan february 2015 yang mencapai 10,53%.

Gambaran terjadinya trend perlambatan penurunan pengangguran di wilayah perdesaan di Provinsi Banten sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa pembangunan desa selama ini belum membuka peluang tercipta pasar kerja di wilayah perdesaan. Badan Kebijakan Fiskal (2018) menyebutkan bahwa semakin tingginya alokasi Dana Desa per kapita tidak selalu meningkatkan kesempatan kerja. Untuk itu diperlukan

reorientasi arah pembangunan desa agar di masa mendatang dapat mengatasi permasalahan pengangguran di wilayah perdesaan khususnya serta provinsi Banten pada umumnya. Paradigma *urban bias* yang merupakan cara pandang dan kebijakan yang memprioritaskan peran daerah perkotaan dibandingkan perdesaan sudah selayaknya ditinggalkan (Anggraini *et al.*, 2021).

### *Alokasi Anggaran Pembangunan Perdesaan di Provinsi Banten*

Pada pembahasan sebelumnya disampaikan bahwa pembangunan desa di



Gambar 4. Alokasi Penganggaran Berdasarkan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2018-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

provinsi Banten belum cukup efektif membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Adanya gap antara pasar tenaga kerja dan lapangan kerja tersedia perlu menjadi perhatian Pemerintah Desa agar program dan kegiatan yang digulirkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Gambar 4 menunjukkan adanya perbedaan alokasi anggaran pembangunan desa secara rata-rata nasional dibandingkan dengan alokasi anggaran pembangunan desa di Provinsi Banten. Penganggaran pembangunan desa di Provinsi Banten memberikan porsi yang cukup dominan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sangat sedikit memberikan alokasi anggaran pembangunan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Perhatian pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan fasilitas/infrastruktur dasar (SMERU, 2018). Hal ini terjadi karena Pemerintah Desa beranggapan bahwa kebutuhan pemenuhan infrastruktur dapat dirasakan oleh banyak orang dibandingkan dengan kegiatan yang secara langsung menyangkut kelompok marginal. Kondisi ini terjadi karena umumnya Pemerintah Desa belum memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berpikir jangka panjang dan berkelanjutan (Anggraini *et al.*, 2021). Analisis anggaran

pembangunan desa sebagaimana tersaji pada gambar 4 menunjukkan perubahan alokasi anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Perubahan ini terjadi akibat adanya kewajiban pengalokasian anggaran untuk kejadian tidak terduga mulai tahun anggaran 2020 akibat adanya Pandemi Covid-19 dan upaya penanggulangan dampak yang terjadi akibat Pandemi Covid.

Fenomena lainnya yang terlihat adalah adanya penganggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Menurut permendagri 114 tahun 2014 kegiatan yang termasuk dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 2) Pelatihan teknologi tepat guna; 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan 4) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa. Keberhasilan perkembangan Bumdes di berbagai daerah dalam optimalisasi sumber daya yang ada di desa hendaknya dijadikan rujukan agar Pemerintah Desa di Banten lebih peduli



dalam penyertaan modal bagi Bumdes. Rahayuningsih et al., (2019) menyebutkan bahwa Bumdes di Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa maupun perekonomian masyarakat, namun lebih jauh kebedaraan Bumdes di desa tersebut mampu melahirkan inovasi dan peningkatan kehidupan sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi potensi ekonomi desa atau pun angkatan kerja yang ada di desa membutuhkan keberpihakan penganggaran pembangunan desa.

Mencermati berbagai bentuk kegiatan dalam bidang pembangunan tersebut nampaknya memiliki keterkaitan yang erat dengan penciptaan pasar kerja atau pun peningkatan kualitas masyarakat agar terserap pasar kerja. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa sehingga tumbuh pemahaman dan kesadaran dari kepala desa serta aparatur desa untuk meningkatkan alokasi penganggaran pada bidang tersebut. Novianto *et al.* (2015) menyebutkan terdapat dua hal pokok yang menjadi fokus pengembangan kapasitas dan kinerja pemerintah desa. Pertama, kapasitas dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan desa. Kedua, kapasitas dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pemberian kewenangan

kepada desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 6/2014 tetap memerlukan pendampingan dari berbagai lembaga *supra desa* untuk mengatasi hambatan keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa. UU No. 6/2014 memberikan amanat perlunya pendampingan untuk desa berupa pembinaan dan pengawasan sebagai langkah penting mengawal perubahan desa (Sutoro *et al.*, 2014). Keberadaan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai salah tenaga profesional yang bertugas mendampingi pemerintahan desa perlu lebih diberdayakan sehingga penyusunan perencanaan lebih optimal hasilnya.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan data times series 2012-2023, TPT wilayah perdesaan di Provinsi Banten menunjukkan nilai yang lebih fluktuatif dibandingkan TPT wilayah Perdesaan nasional. Trend penurunan pengangguran di wilayah perdesaan provinsi Banten periode 2010-2014 lebih cepat dibandingkan dengan periode 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa pasca UU 6/2014 belum mampu menciptakan akselerasi pengentasan pengangguran di wilayah perdesaan di Provinsi Banten.

Belum optimalnya pembangunan desa dalam hal pengurangan pengangguran,

disebabkan kurangnya keberpihakan penganggaran di bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran pembangunan desa yang selama ini dilakukan lebih terkonsentrasi pada bidang Pelaksanaan pembangunan desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

### Rekomendasi

Perlunya peningkatan pemahaman Kepala Desa beserta aparturnya agar orientasi perencanaan penganggaran pembangunan desa tidak hanya terkonsentrasi kepada bidang pembangunan desa khususnya penyediaan infrastruktur tetapi juga memberi perhatian bagi bidang Pemberdayaan masyarakat. Adanya keberpihakan penganggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengatasi permasalahan penganggaran di wilayah perdesaan di Provinsi Banten. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang lebih intensif dari pemerintahan *supra desa* serta Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam setiap proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah memberikan informasi terkait dengan permasalahan pembangunan desa di wilayah provinsi Banten.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro, R., & Christianingrum, R. (2020). Menakar Peran Dana Desa dalam Menekan Kemiskinan Desa. In *Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN*.
- Anggraini, E., Rustiadi, E., Syuaib, M. F., Mulyati, H., Widyastutik, Indrawan, R. D., Djuanda, B., & Tonny, F. (2021). Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan. In T. Panandita (Ed.), *IPB Press* (Cetakan I, Issue Cetakan I). IPB Press.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2018). *Kajian dana desa Analisis empiris badan usaha milik desa, kesempatan kerja, infrastuktur pada seribu desa di Indonesia*.  
[https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian\\_dana\\_desa.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2021. In *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2021* (Issue Februari 2022). Badan Pusat Statistik.
- FAO. (2016). *Addressing the root causes of migration and harnessing its potential for development*.  
<http://www.fao.org/3/a-i6064e.pdf>

- Fitria, S., Sebayang, A. F., & Julia, A. (2021). Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia .... *Prosiding Ilmu Ekonomi*.  
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/25683>
- Herlindawati, A., Trimo, L., & Noor, T. I. (2018). Analisis Tekanan Penduduk Terhadap Petani Padi Sawah (Suatu Kasus di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat)Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat). *Mimbar Agribisnis*, 4(1), 12–24.  
<https://media.neliti.com/media/publications/259238-analisis-tekanan-penduduk-terhadap-petan-4ac1f883.pdf>
- Kurniawan. (2021). Impact of the village fund on village infrastructure development in Indonesia. *Forum Ekonomi*, 23(3), 513–522.
- Novianto, W., Sutrisno, E., Hermawan, R., Nurjaman, R., & Suprihartini, A. (2015). *Telaahan Isu-Isu Strategis* (M. I. A. Nasution (ed.); Cetakan I). Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
- Oktaviana, O. (2023). *Analisis Problematika Pengangguran di Provinsi Banten*.  
<https://birokratmenulis.org/analisis-problematika-pengangguran-di-provinsi-banten/>
- Rahayuningsih, Y., Budiarto, S., & Isminingsih, S. (2019). Peran Bumdes Dalam Penguatan Ekonomi Desa Sukaratu Kabupaten Serang, Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 80–87.  
<https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.63>
- SMERU. (2018). Pemanfaatan Dana Desa. *Buletin SMERU No.2*, 2, 1–16.
- Suasih, N. N. R., & Karmini, N. L. (2022). Identifikasi Permasalahan Pengangguran di Pedesaan: Study Kasus di Pedesaan (Desa Selat Kabupaten Klungkung). *Buletin Studi Ekonomi*, 27(1), 1–8.
- Sutoro, E., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kuriniawan, B. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* (Cetakan Pe). Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Wijaya, P. A., Suprihanto, J., & Riyono, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(1), 117–129.  
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v12i1.24503>
- Yacoub, Y. (2023). *Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengangguran Perdesaan dan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Barat. December 2022*.
- Yuwono, T. P. (2022). *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022>.